

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**SUB KEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Selain itu RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan yang kemudian menjadi isu strategis. Isu strategis dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu pada tingkat hulu (merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB) dan isu hilir (merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan).

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026, telah dibangun *logframe* kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026. Logframe kinerja tersebut menggambarkan bahwa pembangunan daerah Jawa Tengah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari. Mendasarkan pada logframe kinerja tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yaitu “Jawa Tengah yang semakin Sejahtera dan Lestari”. Adapun dalam mewujudkan tujuan dimaksud, didukung melalui sasaran daerah yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis”. Adapun dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah dimaksud peran Reformasi Birokrasi menjadi sangat penting.

Selain dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah, RB menjadi sangat penting sebagai *tools* untuk menjawab isu strategis hulu dan hilir baik di daerah maupun nasional. Sehingga pelaksanaan RB memiliki tujuan untuk mewujudkan "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Daerah dan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Daerah dan Nasional.

## 2. Filosofi Kegiatan

Filosofi Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan RB baik di Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 serta menjawab isu strategis hulu dan hilir.

## 3. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB;
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi RB;
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

## 4. Tujuan

- a. Mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- b. Internalisasi program-program strategis reformasi birokrasi di Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- c. Memecahkan persoalan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

## 5. Manfaat

- a. Mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui reformasi birokrasi;



	di Jawa Tengah Rp 170.000.000	
--	----------------------------------	--

### 3. Bentuk Kegiatan

- a. Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Jawa Tengah.
- b. Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- c. Konsultasi Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi ke Pusat dan study orientasi ke Provinsi lain.

### 4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 untuk Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 265.785.000 (Dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

### 5. Lokasi Kegiatan

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Instansi Pusat/Provinsi lain.

## C. PELAPORAN

1. Laporan pembinaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Laporan pembinaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Laporan konsultasi Pembinaan/Fasilitasi/Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi ke Pusat dan study orientasi ke Provinsi lain.

## D. PENUTUP

Demikian Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja sebagai acuan kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah. Secara lebih detail dijabarkan dalam *schedule* dan Matrik *action plan* sebagaimana terlampir.

Semarang, Januari 2024

KEPALA BIRO ORGANISASI

Dadang Somantri, ATD, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650622 198703 1 007

**PAKET PENGADAAN  
SUB KEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

NO	PENYEDIA / SWAKELOLA	BULAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>A. Penyedia</b>													
1.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp 23.850.000.												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak/Penggandaan Rp 5.850.000.												
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp 10.716.000.												
<b>B. Swakelola</b>													
4.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 184.689.000.												
5.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp 20.000.000.												
6.	Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia												
	- Sub-sub Kegiatan Pembinaan/Fasilitasi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD Provinsi Jawa Tengah Rp 15.000.000.												
	- Sub-sub Kegiatan Pembinaan/Fasilitasi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab./Kota di Jawa Tengah Rp 5.000.000.												

7.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 680.000.													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--